

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan:

1. Berbagai alasan orang tua tidak melaporkan kelahiran anak berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebabkan di antaranya: pertama: banyak warga belum meminta surat domisili tempat mereka tinggal dahulunya, kedua: ada beberapa warga melakukan nikah siri, dan ketiga: salah satu beralasan hanya tinggal berjangka saja menempati rumah tersebut, keempat: warga enggan minta surat pengantar dari RT/RW;
2. Kendala dan tantangan Kelurahan Belakang Tangsi Menerima pelaporan kelahiran anak berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebabkan di antaranya: pertama: kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap urgensi dari pelaporan kelahiran anak tersebut, kedua: aktifitas masyarakat yang sibuk bekerja, ketiga: merasa malu tidak memiliki buku nikah asli, karena beliau menikah siri, keempat: secara teknis masih ada gangguan untuk pengimputan data di pusat; kelima: SDM kantor Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang masih kurang; dan keenam: Nepotisme/kurang adil masih berlaku.
3. Pelaksanaan pelaporan kelahiran anak berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang ditinjau dari Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menyebutkan bahwa masyarakat harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pelayanan, melindungi, dan menjaga hak-hak warga negara sebagaimana dalam kaidah *Siyasah Tanfidziyah*

menyebutkan bahwa setiap hubungan pemerintah dan kebijaksanaan harus berdasarkan kemaslahatan yang baik dan kemaslahatan umum kepada rakyatnya. Sehingga tercapainya kehidupan yang tertib administrasi berupa pelaporan kelahiran anak di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Peneliti sudah mengamati berbagai fakta di lapangan, khususnya dalam pelaporan kelahiran anak tersebut. Peneliti menyarankan untuk Kasi Bidang Tata Pemerintahan Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk lebih fokus lagi agar tidak ada lagi masyarakat yang melupakan kewajibannya sebagai penduduk yang baik;
2. Peneliti menyarankan agar Kasi Bidang Tata Pemerintahan Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, agar tidak adalagi alasan karena ketidaktahuan apabila diminta pertanggungjawaban atas keterlambatan pelaporan pengurusan dokumen kependudukan tersebut;
3. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Daerah lebih tegas dalam memberikan ketegasan dalam keterlambatan masyarakat ketika mengurus akta kelahiran, berupa sanksi administrasi (denda);
4. Peneliti menyarankan agar masyarakat khususnya Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang lebih taat lagi terhadap aturan yang berlaku;
5. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitiannya lebih lanjut terkait permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*.
- Akib, Haedar dan Tarigan. 2008. "Artikulas`1Qi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" *Jurnal Baca* Volume 1. 1- 19.
- Burhanuddin. 1994. *Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Darurejo, Dan Desa. 2016. "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Oleh: Inneke Grandistia." no. 1. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*
- Djazuli, A. 2009. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- George R. Terry, dkk. 2005. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gie, The Liang. 2007. *Administrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta:Liberty.
- Harahap, R., & Siregar, M. R. 2020. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online di Kota Medan". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (JIAP), Volume 8 (Edisi 2), 85-92.
- Hasanuddin, Guru Besar UIN Syarif. 2004. "Islam Memandang Akte Kelahiran Dari Kemashlahatannya." *Jurnal Hukum*. Volume 2.
- Hermanses, U., Aminah, A., & Soselisa, P. S. 2023. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*. Volume 10 (Edisi 2), 429-444.
- Hidayat, Rian. 2022. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)." *Disertasi, UIN Raden Intan Lampung*.
- Hegar, Rizky Febriansyah. 2024. "Implementasi Akta Kelahiran Yang Telah Lewat Waktu Di Kota Semarang." *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Semarang*.

- Irfan, M. 2021. "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima: (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bima). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 18 (Edisi 2), 21-39.
- Irwansyah, Zaenal Setiawan. 2023. " Prinsip- Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum*. Volume 2 Nomor 1, 71-74
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Mariati, Rahman. 2017. *Ilmu Administrasi Media*. Makassar :Mediya
- Lukman. 2013. *Badan Layanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.Hal:7
- Madjid, N. 2001. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mita, Rosalina. 2015. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* Volume 11 (Edisi 2), 71-79.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Sustainability (Switzerland).
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT. Logos Wacanallmu.
- Nur Awalliyah, F., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. 2022. *Implementasi program pengembangan destinasi pariwisata oleh badan promosi pariwisata daerah Kabupaten Ciamis*.
- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan
- Perundang-undangan, Peraturan. 2014. "Tentang Administrasi Kependudukan." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1-104.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. "Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Yang Telah Lewat Waktu Di Kota Semarang Oleh : Febriansyah Rizky Hegar." *Ayan* Volume 15 (Edisi 1). 37-48.
- Ramadhan, A. S., & Prasetya, A. 2021. "Analisis Hambatan dan Solusi dalam Layanan Kependudukan di Daerah 3T". *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, Volume 10 (Edisi 1), 44-53.

- Ramadhani, Awalia. 2023. "Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan." *Skripsi: Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rufaidhah, Arifatul. 2022. Pelaksanaan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Akta Kelahiran yang Terlambat: Studi kasus mengenai keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. *Disertasi. Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Safitri, JM Indri Yuni. 2022. "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Syar'iyah (Studi di Di Desa Candimas Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)." *Skripsi: Program Studi Siyasaah Syariah Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Sanjaya, Roby, 2022. " *Perspektif siyasah syar'iyah terhadap implementasi pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan(Studi di Kampung Gunung Sari Kecamatan GunungLabuhanKabupaten Way Kanan)*" *Skripsi: Program Studi Siyasaah Syariah Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Saebani, B. A. 2008. *Metode penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagisman, Herpi. 2019. "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan."(Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur). *Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu*.
- Siagian, P Sondang. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara
- (2019). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sari, R. A., & Nugroho, Y. 2022. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)" *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Volume 9 (Edisi 2). 112–121.
- Simorangkir, T. T., Pioh, N. R., & Kimbal, A. 2022. Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Governance*, Volume 2 (Edisi 1). Hal 4.

- Shadily. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmadinata. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jogjakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2010. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung.
2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Susanti, N., & Rahayu, D. 2023. "Transformasi Digital dalam Pelayanan Pencatatan Sipil: Studi pada Dinas Dukcapil Kota Bandung". *Jurnal Transformasi Digital Pelayanan Publik*, Volume 1 (Edisi 1). 14–22.
- Terry, George R., Rue, Leslie W. 2014. *Dasar- Dasar Manajemen*, Alih Bahasa: G.A. Ticoalu. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.177.
- Wimaka. Verry Aji Putra. 2016. "Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo." *Skripsi: Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Zespy, Ria Refvita. 2023. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara). *Thesis. UIN Raden Intan Lampung*.